

JURNAL

KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

J. Kebijakan Sosial Ekonomi KP	Vol. 7	No. 2	Hal. 91 - 190	Jakarta Desember 2017	ISSN 2089-6980
--------------------------------	--------	-------	---------------	--------------------------	-------------------

Diterbitkan bersama :



Balai Besar Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan



Jaringan Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 7 Nomor 2, Desember 2017

Penanggung Jawab :

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dewan Redaksi :

Ketua:

Prof. Dr. Zahri Nasution (*Sosiologi Perikanan*)

Anggota:

Dr. Agus Heri Purnomo (*Ekonomi Sumberdaya*)

Dr. Andy Ahmad Zailany (*Antropologi*)

Drs. Masyhuri Imron, MA (*Sosiologi*)

Asep Agus Handaka, S. Pi, MT (*Sosial Ekonomi Perikanan*)

Mitra Bestari :

Dr. Arif Satria (*Kebijakan Kelautan dan Perikanan*)

Dr. Andin H. Taryoto (*Sosiologi Pedesaan*)

Dr. Luky Adrianto (*Ekonomi Ekologi*)

Dr. Fatuchri Sukadi (*Analisis Kebijakan Perikanan*)

Dr. Zuzy Anna (*Ekonomi Sumberdaya*)

Redaksi Pelaksana :

Andrian Ramadhan, S. Pi, MT

Hertria Maharani Putri, MBA

Hakim Miftahul Huda, M.Si

Asep Jajang Setiadi, S.Pi

Desain dan Tata Letak :

Ilham Ferbiansyah, S. Kom

Alamat Redaksi :

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Gedung Balitbang KP Lt. 3

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924

Email: pt.osek@gmail.com

Jurnal Online: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse>

JURNAL

KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI

KELAUTAN DAN PERIKANAN

J. Kebijakan Sosial Ekonomi KP	Vol. 7	No. 2	Hal. 91 - 190	Jakarta Desember 2017	ISSN 2089-6980
--------------------------------	--------	-------	---------------	--------------------------	-------------------

Diterbitkan bersama :



Balai Besar Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan



Jaringan Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 7 Nomor 2 Tahun 2017. Jurnal ini telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor 1221/E/2016 tanggal 22 September 2016 dengan Sertifikat Akreditasi No. 758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016. Jurnal ini merupakan pengembangan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yg diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, maka sejak tanggal 30 Maret 2017 terjadi perubahan nama nomenklatur organisasi dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Penerbitan jurnal ini didanai oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi yang ditampilkan meliputi: (i) Kebijakan Peneggelaman Kapal Pencuri Ikan di Wilayah Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum; (ii) Strategi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap di Kabupaten Kayong Utara; (iii) Analisis Pengawasan Kapal Perikanan Terhadap Penanggulangan Illegal Fishing di Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Indonesia; (iv) Upaya Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap; (v) Potensi dan Peluang Pengembangan Perikanan Budi Daya di Kabupaten Kepulauan Anambas; (vi) Ecolabelling Perikanan: Sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) Untuk Produk Tuna (Studi Kasus: Bali), dan; (vii) Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut di Pantai Depok Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang.

Redaksi

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Volume 7 Nomor 2, Tahun 2017

DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL PENCURI IKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM	
<i>Oleh : Hertria Maharani Putri, Radityo Pramoda dan Maulana Firdaus</i>	91 - 102
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN KAYONG UTARA	
<i>Oleh : Risna Yusuf dan Rizky Muhartono</i>	103 - 114
ANALISIS PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN TERHADAP PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA	
<i>Oleh : Bayu Y. Suharto, Johnny Budiman dan Denny B.A. Karwur</i>	115 - 125
UPAYA PERLINDUNGAN NELAYAN TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA PERIKANAN TANGKAP	
<i>Oleh : Hikmah dan Zahri Nasution</i>	127 - 142
POTENSI DAN PELUANG PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDI DAYA DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	
<i>Oleh : Nensyana Shafitri dan Permana Ari Soejarwo</i>	143 - 157
ECOLABELLING PERIKANAN: SERTIFIKASI MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC) UNTUK PRODUK TUNA (Studi Kasus: Bali)	
<i>Oleh : Radityo Pramoda dan Hertria Maharani Putri</i>	159 - 177
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS SUMBER DAYA ALAM PESISIR DAN LAUT DI PANTAI DEPOK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	
<i>Oleh : Agustina Setyaningrum, Heny Budi Setyorini dan Edy Masduqi</i>	179 - 190

**KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL PENCURI IKAN
DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM**
Law Perspective of Scuttling Policy for IUU Fishing in Indonesia

Hertria Maharani Putri, Radityo Pramoda dan Maulana Firdaus

ABSTRAK

Besarnya kerugian negara akibat pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia menyebabkan pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP) membuat strategi pemberantasannya. Strategi kebijakan yang diambil yaitu melaksanakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang tertangkap. Tujuan penelitian ini mengkaji tindakan pemerintah melaksanakan kebijakan penggelaman kapal ditinjau dari aspek yuridis. Pembahasan penelitian dianalisis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan pemerintah melaksanakan kebijakan penenggelaman kapal, tidak melanggar ketentuan hukum internasional dan nasional. Rekomendasi kebijakan penelitian ini adalah mendorong pemerintah untuk tetap melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan pencurian ikan, sebagai upaya menjaga kedaulatan bangsa dan sumber daya ikan.

Kata Kunci: kebijakan, penenggelaman kapal,
pencuri ikan, perspektif hukum

ABSTRACT

The depth of loss from illegal fishing within Indonesian waters has forced the Indonesian (Ministry of Marine Affairs and Fisheries/KKP) to take strategic measures, such as scuttling. This study aimed at analyzing scuttling through a juridical point of view. The analysis was conducted using a juridical normative method with a qualitative approach and descriptively elaborated. The study showed that scuttling is not in any ways violating both national as well as international laws. Therefore it is recommended that the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries to keep scuttling on to battle the illegal fishing and maintain its sovereignty and fish resource.

Keywords: policy, scuttling, illegal fishing, juridical perspective

**STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP
DI KABUPATEN KAYONG UTARA**
Development Strategy on Capture Fisheries in District Kayong Utara

Risna Yusuf dan Rizky Muhartono

ABSTRAK

Kabupaten Kayong Utara masuk ke dalam WPP 711 dan memiliki 103 pulau yang tersebar di empat kecamatan. Selain potensi perikanan tangkap, kabupaten ini memiliki potensi perikanan perairan umum berupa sungai, rawa waduk dan budi daya kolam. Potensi yang dimiliki belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah strategi yang akan dilakukan dalam rangka mengembangkan perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber informasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Metode analisis yang digunakan adalah metode SWOT dan QSPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa strategi yang perlu dilakukan untuk pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara yaitu; (1) Pengembangan teknologi

ABSTRACT

Kabupaten Kayong Utara located at WPP 711 and have 103 island that spread into four district. Besides capture fisheries, this regency have potency in inland fisheries such as river, swamp, reservoir and pond aquaculture but in fact, it is not been fully utilized. The goal of the research was to identify the steps of strategy in order to develop of capture fisheries in District Kayong Utara. the research using primary and secondary data. The analysis data using SWOT and QSPM. The result showed that the strategy of developing capture fisheries in District Kayong Utara were (1) Developing capture technology; (2) Increasing of monitoring capture areas; (3) Buiding transportation vihecle and distribution. The priority of steps on the QSPM approach of strategy were (developing capture technology with the total score

penangkapan; (2) Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan, dan; (3) Membangun sarana transportasi dan distribusi ikan. Adapun urutan prioritas langkah-langkah strategi dengan pendekatan QSPM adalah sebagai berikut; (1) Pengembangan teknologi penangkapan dengan *total score attractiveness* sebesar 18,33005694; (2) Membangun sarana transportasi dan distribusi ikan dengan *total score attractiveness* sebesar 13,13045483, dan; (3) Peningkatan pengawasan terhadap wilayah penangkapan dengan *total score attractiveness* sebesar 10,7027257. Pengembangan teknologi penangkapan dan armada bagi nelayan lokal diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dalam melakukan kegiatan penangkapan sehingga mampu bersaing dengan nelayan pendatang yang melakukan kegiatan penangkapan di wilayah yang sama. Kegiatan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan mutlak diperlukan guna mencegah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Wilayah yang luas dan memiliki pulau-pulau yang tersebar, mengharuskan dibangunnya sistem transportasi dan distribusi pengangkutan ikan yang efektif dan menguntungkan sehingga hasil tangkapan nelayan memiliki nilai jual yang baik dan mampu bersaing.

Kata Kunci: strategi, perikanan tangkap, SWOT, QSPM

was 18,33005694; (2) Buiding of transportation and distribution of fish the tottal score was 13,13045483; and (3) Increasing of supervision to fishing grounds with total attractiveness score 10,7027257. Development of capture technology and fleet to local fisher expected to be able increasing produktivity and can compete with andon fisher that conduct fishing activities in the same area. Supervision of fisheries must be done to prevent Illegal fishing. A wide area with most islands are scattered, require to be built transportation and distribution system, which the fishermen that has benefits, good selling point and able to compete.

Keywords: strategy, capture fisheries, SWOT, QSPM

ANALISIS PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN TERHADAP PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA

Analysis of Fishing Vessel Supervision on Illegal Fishing Control in The Waters of the Regency of Sangihe Islands, Indonesia

Bayu Y. Suharto, Johnny Budiman dan Denny B.A. Karwur

ABSTRAK

Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Philipina dan juga mempunyai karakteristik wilayah perairan yang memiliki keragaman sumberdaya hayati yang bernilai ekonomis tinggi. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah masih maraknya kegiatan *illegal fishing* yang terjadi baik dilakukan oleh kapal ikan asing ataupun kapal ikan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis *stakeholder* prioritas dan faktor-faktor penting dalam pengawasan kegiatan *illegal fishing*. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis AHP (*Analisis Hirarki Proses*) yaitu untuk menentukan *stakeholder* prioritas dan faktor-faktor prioritas dalam pengawasan kapal perikanan dan meningkatkan strategi penerapan kebijakan yang tepat dalam kegiatan pengawasan *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat menjadi *stakholder* prioritas dalam pengawasan kegiatan *illegal fishing* di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang didukung oleh kegiatan penegakan hukum dan peran dari pemerintah daerah. Faktor-faktor penting dalam pengawasan kegiatan *illegal fishing* yaitu ketersediaanya sarana, prasarana pengawasan dan anggaran pengawasan serta ditunjang dengan sumber daya manusia pengawas yang terampil dan juga sosialisasi peraturan sehingga kegiatan pengawasan kapal perikanan dapat berjalan dengan optimal.

Kata Kunci: pengawasan kapal, illegal fishing, AHP

ABSTRACT

The regency of Sangihe Islands belongs to an area directly bordering with the neighborhood country, the Philippines and also possesses a typical marine waters with diverse highly economic living resources. Recent problem is illegal fishing practices done by either Indonesian or foreign fishing vessels. Analyze stakeholder priorities and important factors in controlling the illegal fishing activities. The study used a Hierarchy Process Analysis to determine the priority stakeholders and the priority factors in fishery vessel supervision and develop the appropriate policy implementation strategy in illegal fishing surveillance activities in the territorial waters of Sangihe Islands Regency. Results indicated that the Central Government became the priority stakeholder in supervising the illegal fishing in the waters of Sangihe Islands regency, supported by law enforcement activities and the role of the local government. Important factors in the supervision of illegal fishing activities are availability of facilities, monitoring infrastructure and supervision budget and supported by skilled human resources supervisor and also socialization of regulation so that fishery supervision activity can run optimal.

Keywords: supervision of fishing vessels, Illegal fishing, AHP

UPAYA PERLINDUNGAN NELAYAN TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

Fishermen Safeguard to Capture Fisheries Business Sustainability

Hikmah dan Zahri Nasution

ABSTRAK

Nelayan memiliki peran yang sangat strategis pada sektor kelautan dan perikanan. Peran tersebut sudah semestinya dihargai dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan baik untuk kehidupan maupun usaha nelayan. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi eksisting dan permasalahan dalam upaya perlindungan nelayan. Lokasi penelitian di Kabupaten Indramayu, Cilacap, Merauke dan Buton. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan meliputi aspek perlindungan nelayan yang tercantum dalam undang-undang perlindungan nelayan yang meliputi: Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan; kepastian usaha pada masyarakat nelayan; peningkatan kemampuan dan kapasitas nelayan; penguatan kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; perlindungan nelayan terhadap risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan sistem jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum bagi nelayan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Berbagai persoalan masih sering menghimpit nelayan terutama para ABK dan buruh seperti ketidakpastian usaha, ketidakadilan dalam pembagian upah, resiko usaha yang tinggi, dan kurangnya jaminan serta pendampingan hukum. Rekomendasi disarankan perlu pengembangan investasi secara terpadu, baik pengembangan perikanan di sentra-sentra usaha perikanan tangkap, peningkatan operasional pelabuhan perikanan sesuai peran dan fungsinya, sosialisasi dan pembinaan terhadap nelayan tentang pentingnya asuransi nelayan sebagai jaminan resiko dalam usaha penangkapan ikan, pemerintah perlu meningkatkan jaminan dan pendampingan hukum bagi nelayan, terutama anak buah kapal di kapal-kapal besar.

Kata Kunci: perlindungan nelayan, keberlanjutan usaha, perikanan tangkap

ABSTRACT

Fisher's have a strategic role in the marine and fisheries sector. That role should be appreciated in the form of protection and empowerment life and fishing effort. This study aims to provide an overview of the existing conditions and problems in the protection of fishermen. The research locations are Indramayu, Cilacap, Merauke and Buton. The research method was used a qualitative approach. The types of data collected include fishing protection aspects contained in the fishing protection laws that include: availability of facilities and infrastructure to fisheries; business certainty on fishing communities; increasing of fishermen capability and capacity, strengthening institutional capacities in managing fish resources and develop the principles of environmental sustainability; financing systems and institutions that serve the interests of the business; fishing protection against the risk of natural disasters, climate change, and pollution; and security and safety system as well as legal aid for fishermen. The data were analyzed qualitatively and then be discussed. The conclusions were used as an answer of any problems. Various problems still often choke the fishermen, especially the crew and workers as business uncertainty, injustice in the distribution of wages, high business risk, and the lack of guarantees as well as legal assistance. Recommendations suggested are integrated investment development, both in the development of fisheries in the centers of fishery business, improvements of fishing ports operational based on role and function, socialization and training to the fishermen about the importance of insurance fisherman as security risk in fishing effort. The government needs to increase the guarantee and legal aid for fishermen, especially the crews of large vessels.

Keywords: fishermen safeguard, business sustainability, fisheries capture

POTENSI DAN PELUANG PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDI DAYA DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Potential and Opportunity of Fishery Development Development in Anambas Islands District

Nensyana Shafitri dan Permana Ari Soejarwo

ABSTRAK

Perikanan budi daya merupakan salah satu mata pencaharian yang sangat potensial di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Oleh karena itu kegiatan ini harus mampu dikembangkan secara optimal dari berbagai sisi di antara dari sisi lingkungan, pasar, masyarakat dan sarana prasarana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan perikanan budi daya di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menggunakan *SWOT* dan *Quantitatif Strategic Plan Matrix (QSPM)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut yang paling berpengaruh dari komponen kekuatan yaitu pelaku usaha budi daya dengan skor 0,825 dan kualitas sumberdaya perairan dengan skor 0,795. Sedangkan pada komponen kelemahan atribut yang paling berpengaruh yaitu kendala hama dan penyakit dengan skor 0,171 dan belum adanya Balai Benih Ikan dengan skor 0,133. Komponen peluang atribut yang paling dominan yaitu peluang pasar yang masih terbuka dengan skor 1,607 dan jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dengan skor 1,160. Sedangkan komponen ancaman atribut yang paling berpengaruh yaitu belum adanya kelembagaan permodalan dengan skor 0,128 dan terbatasnya infrastuktur akses produksi dengan skor 0,013. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi *SWOT* masuk pada kuadran 1 Strategi SO (*maxi-maxi strategy*). Sementara itu hasil *QSPM* menjelaskan bahwa langkah-langkah prioritas strategi dalam pengembangan usaha perikanan budi daya di Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan dengan mengoptimalkan teknologi dan sarana prasarana dalam mendukung perikanan budi daya, meningkatkan potensi peluang pasar serta melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam usaha perikanan budi daya.

Kata Kunci: Kabupaten Kepulauan Anambas, perikanan budi daya, *QSPM*, *SWOT*

ABSTRACT

Aquaculture is one of the most potential livelihoods in the Anambas Islands Regency. Therefore, this activity should be able to be developed optimally from various side in between environment, market, society and infrastructure. This study aims to determine the strategy of aquaculture development in Anambas Islands Regency by using SWOT and Quantitative Strategic Plan Matrix (QSPM). The result shows that the most influential attributes of the power component are cultivators with a score of 0.825 and the quality of water resources with a score of 0.795. Meanwhile the components of attribute weaknesses which very influential are pest and disease constraints with a score of 0.171 and there is no Fish Seed Institution with a score of 0.133. The most dominant component of attribute opportunity is the open market opportunity with the score of 1.607 and the type of fish that has a high economic value with a score of 1,160. Whereas the components of the most influential attribute threats is the absence of institutional capital with a score of 0.128 and the limited access to production infrastructure with a score of 0.013. This research indicates that SWOT strategy entered in quadrant 1 Strategy of SO (maxi-maxi strategy). Mean while QSPM results explain that the strategic priority steps in the development of aquaculture business in Anambas Islands Regency is done by optimizing technology and infrastructures in supporting aquaculture fishery, increasing the potential of market opportunity and also improving human resource capacity in cultivation aquaculture business.

Keywords: *Anambas Islands Regency, aquaculture, QSPM, SWOT*

**ECOLABELLING PERIKANAN: SERTIFIKASI MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC)
UNTUK PRODUK TUNA (STUDI KASUS: BALI)**
***Fisheries Ecolabelling: Marine Stewardship Council (MSC) Certification for Tuna Product
(Case Study: Bali)***

Radityo Pramoda dan Hertria Maharani Putri

ABSTRAK

Ekolabel MSC adalah sebuah pengesahan terhadap produk yang memenuhi kriteria prosedur keberlanjutan lingkungan dan telah dikelola dengan baik. Sejak MSC mulai diperkenalkan di Indonesia, eksportir tuna Bali masih memiliki keraguan menggunakan sertifikasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah memahami ketentuan MSC serta regulasi nasional pendukungnya, serta menilai penerapannya. Analisis untuk mengkaji ketentuan MSC dan regulasi nasional menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan studi kasus, sedangkan kesiapan eksportir menerapkan MSC dibahas dengan metode statistika deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) MSC memiliki 3 prinsip, 29 variabel, 90 kriteria; (2) secara umum regulasi nasional yang teridentifikasi materinya bisa dipedomani mendukung MSC, meskipun masih ada yang belum teknis mengaturnya; (3) eksportir di Bali secara keseluruhan tidak siap mengadopsi prinsip MSC; (4) implementasi MSC masih mengalami hambatan di Bali karena tidak didukung pemerintah, syarat yang rumit, serta biaya yang besar. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah: (a) mengadopsi prinsip MSC untuk membangun sektor perikanan tangkap; (b) membentuk regulasi yang lebih operasional untuk mendukung setiap prinsip MSC; (c) menetapkan kebijakan mengenai ekolabel yang harus dipatuhi oleh eksportir tuna dan memberikan pendampingan dalam implementasinya, dan; (d) melakukan negosiasi kepada pembeli ataupun menyiapkan tenaga *accessor* untuk meringankan biaya sertifikasi.

Kata Kunci: ekolabeling, perikanan, MSC, tuna

ABSTRACT

*MSC Ecolabel is a certification to a product that meets criteria of sustainability environment and well organized. Since MSC began to be introduced in Indonesia, tuna Bali exporters still have doubts about using the certification. The objective of this research is to comprehend MSC rule and its national supporting regulation as well as to assess its implementation. Analysis of MSC rule and national regulation applies empirical yuridis method through case study approach, while descriptive statistic method is used to analyze exporters readiness to implement MSC. Results of the research indicate: MSC has 3 principles, 29 variables, 90 criterias; (2) generally, national regulation with identified material can be a guideline to support MSC eventhough there is no technical management yet; (3) most exporters in Bali have not been ready to adopt MSC principles; (4) MSC implementation in Bali encounter problems due to lack of government support, difficult requirements, and high cost. Recommendation of policy to the government: (a) adopting MSC principles to develop capture fisheries sector; (b) creating more operational regulation to support each of MSC principles; (c) regulating policies on ecolabel that must be obeyed by Tuna exporters as well as assisting its implementation; (d) negotiating to purchaser or providing *accessor* in order to reduce certification cost.*

Keywords: *ecolabeling, fishery, MSC, tuna*

**STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS SUMBER DAYA ALAM
PESISIR DAN LAUT DI PANTAI DEPOK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
*Development Strategy of Tourism Activity Base on Coastal and Marine Resources in
Depok Beach, Daerah Istimewa Yogyakarta*

Agustina Setyaningrum, Heny Budi Setyorini dan Edy Masduqi

ABSTRAK

Kawasan pariwisata Pantai Depok dewasa ini mulai dikenal luas oleh masyarakat. Selama ini tempat wisata ini dikenal dengan wisata kulinernya. Sumber daya alam pesisir dan laut yang ada di Pantai Depok beragam baik itu sumber daya hayati maupun sumber daya non hayati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi pengembangan pariwisata berbasis sumber daya alam pesisir dan laut di Pantai Depok. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik *Rapid Rural Appraisal* digunakan dalam penelitian ini. Keberagaman sumber daya alam pesisir dan laut dapat menjadi salah satu daya tarik wisata baru di Pantai Depok. Salah satunya adalah dengan pengolahan produk hasil kelautan. Produk tersebut perlu dimaksimalkan agar produk tersebut memiliki nilai tambah dan nilai jual yang tinggi. Pengolahan produk hasil kelautan ini dapat dijadikan sebagai produk unggulan baru yang mendukung kegiatan pariwisata di Pantai Depok.

Kata Kunci: sumber daya, pariwisata, nilai tambah

ABSTRACT

Depok Beach tourism area today is becoming widely known by the public. This tourist spot known as culinary tour. The coastal and marine natural resources in Depok Beach are both biological and non-biological resources. The purpose of this research is to formulate coastal and marine natural resource-based tourism development strategy in Depok Beach. Data used in this research include primary data and secondary data. Rapid Rural Appraisal techniques were used in this study. The diversity of coastal and marine natural resources can be one of the new tourist attraction in Depok Beach. One of them is the processing of marine products. The product needs to be maximized so that the product has added value and high selling value. Processing of marine products can be used as a new flagship product that supports tourism activities in Depok Beach.

Keywords: *marin resources, tourism activity, value added*

(Indeks Pengarang)
(Author Index)

Budiman, Johnny	115 - 125
Firdaus, Maulana	91 - 102
Hikmah	127 - 142
Karwur, Denny B. A.	115 - 125
Masduqi, Edy	179 - 190
Muhartono, Rizky	103 - 114
Nasution, Zahri	127 - 142
Pramoda, Radityo	91 - 102 159 - 177
Putri, Hetria Maharani	91 - 102 159 - 177
Setyaningrum, Agustina	179 - 190
Setyorini, Heny Budi	179 - 190
Shafitri, Nensyana	143 - 157
Soejarwo, Permana Ari	143 - 157
Suharto, Bayu F.	115 - 125
Yusuf, Risna	103 - 114

(Indeks Subjek)
(Index Subject)

AHP	115 - 125
Ekolabeling	159 - 177
Illegal fishing	115 - 125
Kabupaten Kepulauan Anambas	143 - 157
Keberlanjutan usaha	127 - 142
Kebijakan	91 - 102
MSC	159 - 177
Nilai tambah	179 - 190
Pariwisata	179 - 190
Pencuri ikan	91 - 102
Penenggelaman kapal	91 - 102
Pengawasan kapal	115 - 125
Perikanan budi daya	143 - 157
Perikanan tangkap	103 - 114 127 - 142
Perikanan	159 - 177
Perlindungan nelayan	127 - 142
Perspektif hukum	91 - 102
QSPM	103 - 114 143 - 157
Strategi	103 - 114
Sumber daya	179 - 190
SWOT	103 - 114 143 - 157
Tuna	159 - 177

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pedoman Bagi Penulis

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan memuat hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian bidang sosial dan ekonomi kelautan dan perikanan. Naskah yang diterima yaitu karya tulis yang merupakan karya asli dan belum pernah diterbitkan dipublikasi lainnya.

UMUM

Kertas	:	HVS A4 (21,0 x 29,7 cm)
Margin	:	Kiri 3 cm Bawah, Kanan dan Atas 2 cm
Huruf	:	Arial, 11 pt, hitam, 1,5 spasi. ketik dalam Bahasa Indonesia (kecuali abstrak) atau Bahasa Inggris yang baik dan benar, tidak diperkenankan menggunakan singkatan yang tidak umum.
Struktur	:	Judul, Abstrak, Pendahuluan, Metodologi, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan, Ucapan Terima Kasih dan Daftar Pustaka

Naskah dikirim melalui *Online* di alamat web <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse> atau alamat ke Redaksi Pelaksana Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Gedung Balitbang KP I, Komplek Bina Samudera, Jl. Pasir Putih I Ancol Timur, Jakarta 14430, telp (021) 64700924, fax (021) 64711583, Email: pt.osek@gmail.com

PENULISAN NASKAH

Naskah ditulis rapi dengan panjang naskah maksimum 20 halaman (termasuk gambar dan tabel) dan setiap lembar tulisan diberi nomor halaman.

Judul

Judul harus ditulis secara ringkas (maksimal 15 kata), tetapi cukup informatif untuk menggambarkan isi tulisan. Ditulis dalam Bahasa Indonesia dan di bawahnya dalam Bahasa Inggris, menggunakan huruf Arial, kapital Bold, 12 pt, center.

Penulis dan institusi

Penulis dan Institusinya ditulis berurutan di bawah judul. Nama penulis ditulis dengan huruf Arial, kapital bold, 10 pt, center. Institusi asal (alamat, nomor telepon, nomor faksimil, serta e-mail) ditulis dengan huruf Arial, kapital dan kecil, 10 pt, center.

Abstrak

Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tidak lebih dari 200 kata dan hanya satu kalimat/paragraf. Abstrak memberikan informasi singkat namun jelas tentang alasan penelitian dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh serta kesimpulan. ditulis dengan huruf Arial, 10 pt.

Kata Kunci

Ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, terdiri dari 4 sampai 6 kata tulis di bawah abstrak.

Pendahuluan

Pendahuluan sebaiknya dimulai dengan menjelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah, kerangka teoritis, dan tujuan penelitian yang dibuat secara ringkas.

Metodologi

Diuraikan secara rinci dan jelas mengenai lokasi dan waktu penelitian, bagaimana data diperoleh dan sumbernya serta bagaimana metode analisis datanya, jika metode yang digunakan telah diketahui sebelumnya harus dicantumkan acuannya.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyuguhkan data dan informasi yang ditemukan peneliti serta dipakai sebagai dasar penyimpulan bahkan penyusunan teori baru. Secara umum disuguhkan secara bertahap dalam tiga bagian: uraian temuan data dan informasi yang terkumpul. Sertakan data pendukung yang berupa tabel, grafik dan gambar seperlunya untuk memperjelas dan mempersingkat uraian yang harus diberikan.

Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Kesimpulan diuraikan secara ringkas dan jelas mengacu pada pokok-pokok bahasan serta kemampuan mengartikulasikan temuan pokok untuk rekomendasi kebijakan, ditulis secara singkat dan jelas dalam dua atau tiga kalimat. Pada intinya menegaskan apakah tujuan penelitian ini sudah tercapai atau masih ada hal-hal yang belum dicapai. Bila belum, jelaskan apa penyebabnya.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan Terima Kasih Ditulis dengan formal, ucapan diberikan pihak tertentu, misalnya Sponsor penelitian, nama yang benar-benar terlibat dalam pelaksanaan penelitian dan ucapan tidak terlalu berlebihan.

Daftar Pustaka

Dicantumkan dalam naskah bila ada pengutipan dari sumber lain. Proporsi daftar pustaka yang diacu yaitu 80% merupakan rujukan primer dan merupakan terbitan 5 tahun terakhir. Tuliskan hanya pustaka yang dirujuk dalam makalah saja. Hindari pustaka yang bersumber pada majalah, koran, atau media lainnya yang non-ilmiah. Disusun berdasarkan abjad.

Buku :

Huda, H.M., R.A. Wijaya dan S. Koeshendrajana. 2011. *Dinamika Perkembangan Sosial Ekonomi Usaha Rumah Tangga Petambak Garam*. In Koeshendrajana (eds.), *PANELKANAS: Dinamika Perkembangan Usaha, Pendapatan dan Konsumsi Rumah Tangga*. Badan Riset Kelautan dan Perikanan. Jakarta

Prosiding :

Solihin, A., S. Koeshendrajana dan F. Y. Arthatiani. 2012. *Harmonisasi Hukum Internasional Dalam Pemberantasan IUU Fishing dan Implementasinya dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. In Isnansetyo *et al.* (eds.), *Prosiding Seminar Nasional IX Tahun 2012.*, SE-04: 1-17. Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian UGM. Yogyakarta.

Jurnal Ilmiah :

Pitcher, T.J. and D.B Preikshot. 2001. *Rapfish: A Rapid Appraisal Technique to Evaluate the Sustainability Status of Fisheries*. *Fisheries Research*. Vol 49(3): 255-270

Artikel dari situs internet ;

Sahyuti. 2012. *Ciri-ciri Masyarakat Adat*. <http://syahyutivariabel.blogspot.com/2012/07/ciri-ciri-masyarakat-adat.html>. (diakses 27 Desember 2012).



LEMBAGA
ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA

SERTIFIKAT

Nomor: 758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016

Akreditasi Majalah Ilmiah

Kutipan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Nomor 1221/E/2016 Tanggal 22 September 2016

Nama Majalah : Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
ISSN / e-ISSN : 2089-6980/ 2527-3280
Redaksi : Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gedung Balitbang KP
Lt. 3-4. Jl. Pasir Putih No. 1 Ancol Timur, Jakarta Utara

Ditetapkan sebagai Majalah Ilmiah

TERAKREDITASI

Akreditasi sebagaimana tersebut di atas
berlaku mulai Agustus 2016 - Agustus 2021

Jakarta, 22 September 2016

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia


Prof. Dr. Ir. Iskandar Zulkarnain,

P2MI

Panitia
Penilai
Majalah
Ilmiah



KAN
Komisi Akreditasi Nasional
Lembaga Sertifikasi Sistem Manaj.
ISSN : 010 - 110N



BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Gedung Balitbang KP Lt. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Web : www.bbrse.kkp.go.id
www.bbrse.net
email : pt.losek@gmail.com

ISSN **2089-6980**

